



## Ringkasan Kebijakan No. 29

# Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Indonesia melalui Akses OECD<sup>1</sup>

Oleh Biyan Shandy, Deasy Pane, Fresa Yuriza, Hasran, Krisna Gupta, Leony Fadila, Maria Dominika, Naura Nabila, dan Wahyuni Bahar



### Pesan Utama

- Akses ke OECD dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produk domestik bruto (PDB), memperkuat neraca perdagangan, serta menarik lebih banyak investasi. Hal-hal tersebut pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penyesuaian tata kelola, kebijakan ekonomi, dan standar perdagangan Indonesia dengan praktik terbaik internasional. Penyesuaian ini juga akan meningkatkan kepercayaan investor, mendorong efisiensi pasar, serta mempererat hubungan dagang.
- Model *computable general equilibrium* (CGE) mengestimasi bahwa akses ke OECD akan membawa dampak positif yang signifikan terhadap kinerja makroekonomi Indonesia. Jika bergabung dengan OECD, Indonesia diproyeksikan akan menerima arus masuk investasi sebesar US\$ 87,7 miliar pada 2028, atau setara dengan 0,1% dari PDB Indonesia pada tahun tersebut. Porsi terbesar investasi ini (25%) diperkirakan berasal dari negara-negara anggota OECD.
- Dari segi indikator makroekonomi, tingkat investasi diproyeksikan lebih tinggi 1,2 poin persentase dibandingkan skenario *baseline* (tanpa akses OECD) dalam jangka pendek (2028–2030), dan 1,8 poin persentase dalam jangka menengah (2031–2035). Dalam jangka panjang, pertumbuhan investasi mengalami normalisasi setelah lonjakan investasi pada awal akses.
- Tingkat pertumbuhan PDB tahunan Indonesia diperkirakan lebih tinggi 0,8 poin persentase dibandingkan skenario *baseline* dalam jangka pendek (2028–2030), dan 0,9 poin persentase dalam jangka menengah (2031–2035). Dalam jangka panjang, pertumbuhan PDB mengalami normalisasi setelah lonjakan PDB pada awal akses.
- Penurunan surplus perdagangan Indonesia diperkirakan terjadi dalam jangka pendek dan menengah. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya investasi yang mendorong permintaan impor hingga melampaui kapasitas produksi dalam negeri pada periode tersebut. Namun, dalam jangka panjang (2036–2045), neraca perdagangan diproyeksikan akan kembali menguat. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia diharapkan terus memberikan gestur terbuka dan adaptif sebagai kunci untuk mendukung proses penyesuaian ini.

<sup>1</sup> Ringkasan kebijakan ini merangkum temuan utama dan rekomendasi dari studi berjudul "Membuka Potensi Ekonomi Indonesia melalui Akses OECD". Studi ini dilakukan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), dengan dukungan dari Foreign, Commonwealth & Development Office, Pemerintah Britania Raya. Studi ini menyoroti potensi dampak makroekonomi dari akses Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD).

# Latar Belakang

Indonesia berambisi untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045, sebagaimana tertuang dalam Visi Indonesia Emas 2045. Sebagai salah satu strategi untuk mencapai cita-cita tersebut, Indonesia telah mencanangkan diri untuk menjadi anggota OECD pada 2027, dan kini resmi berstatus sebagai negara kandidat akses. Jika berhasil, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara dan negara Asia ketiga setelah Jepang dan Korea Selatan yang bergabung dengan OECD. Keanggotaan ini juga berpotensi membawa perbaikan terhadap kondisi makroekonomi Indonesia, selayaknya dialami anggota OECD lainnya, seperti Meksiko, Kosta Rika, dan Kolombia.

Namun, sebagai prasyarat untuk menjadi anggota, OECD mewajibkan Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakannya dengan berbagai standar, praktik terbaik, dan rekomendasi OECD. Hal ini menuntut reformasi regulasi yang menyeluruh di berbagai sektor. Untuk itu, pada 2024, Pemerintah Indonesia telah melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) guna mengidentifikasi regulasi-regulasi yang belum sepenuhnya sejalan dengan instrumen OECD.

Ringkasan kebijakan ini merangkum temuan-temuan dari studi yang dilakukan oleh CIPS yang berjudul “Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Indonesia melalui Akses OECD”. Selain itu, dokumen ini menyajikan sejumlah wawasan dan temuan awal terkait bagaimana proses akses ke OECD—beserta reformasi regulasi yang menyertainya—dapat memengaruhi kondisi makroekonomi Indonesia, termasuk terhadap PDB, neraca perdagangan, dan investasi. Untuk keperluan analisis, studi ini menggabungkan *desk research* untuk memperoleh gambaran situasi ekonomi saat ini, penilaian dampak regulasi (*regulatory impact assessment*) untuk mengidentifikasi potensi reformasi terkait akses ke OECD, serta penggunaan model *computable general equilibrium* (CGE) untuk memproyeksikan dampak ekonomi dari keanggotaan OECD.

## Akses OECD Penting bagi Agenda Ekonomi Indonesia

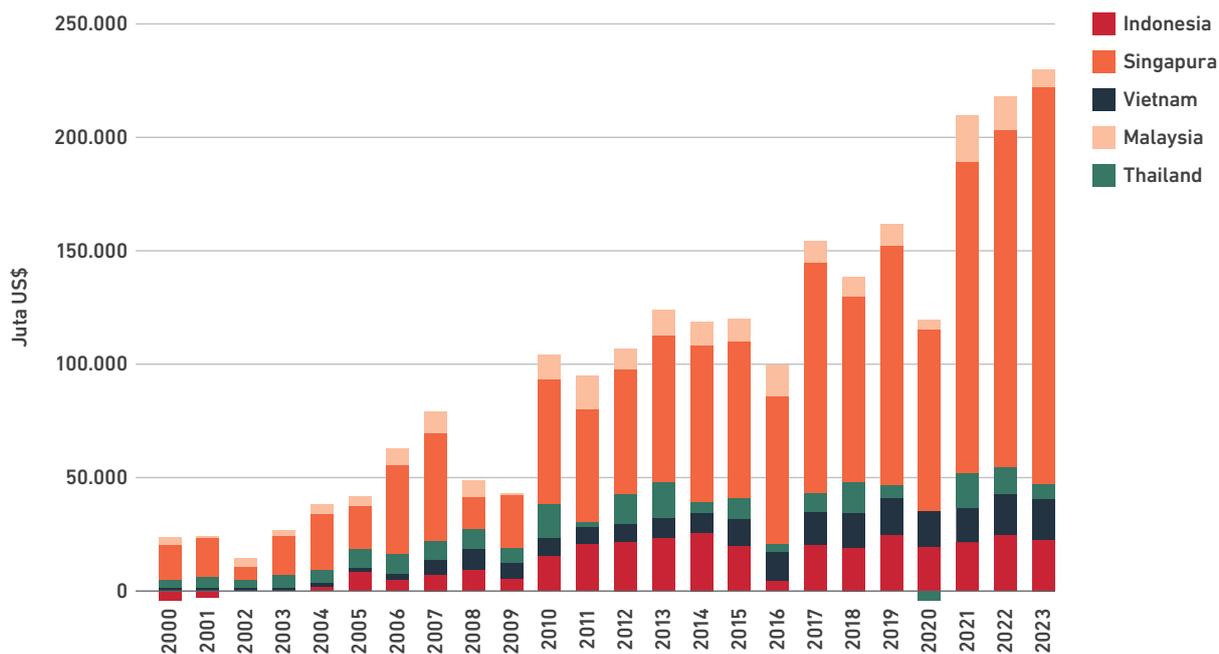
Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan menurunkan angka kemiskinan, dengan rata-rata pertumbuhan PDB di kisaran 5%–6% selama dua dekade terakhir (Bank Dunia, 2023). Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki posisi strategis untuk memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian global. Namun, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, peningkatan produktivitas nasional perlu menjadi agenda utama. Selama periode 2005–2019, pertumbuhan produktivitas faktor total (*total factor productivity* atau TFP) Indonesia memiliki rata-rata -0,7%. Tantangan utama yang perlu diatasi mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, efisiensi sektor ekonomi, dan penguatan kapasitas riset dan inovasi. Di sisi lain, sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk tumbuh lebih tinggi dan sejajar dengan negara-negara ekonomi besar, seperti Tiongkok dan India, serta negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Ke depan, pemerintah Indonesia perlu memberi perhatian pada harmonisasi regulasi termasuk penyederhanaan hambatan non-tarif yang masih menghambat arus barang dan investasi. Selain itu, mendorong keterlibatan Indonesia yang lebih dalam dalam rantai nilai global akan menjadi kunci untuk memperkuat daya saing dan mempercepat transformasi ekonomi nasional (Hill & Pane, 2018).

Kinerja ekonomi Indonesia bervariasi antarsektor:

- Struktur ekspor Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada komoditas sumber daya alam, seperti batu bara dan kelapa sawit (Laksono, Oktiyanto & Vadila, 2024). Walaupun komoditas ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam menjadikan perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga global. Secara bertahap, Indonesia tengah mendorong transisi ke menuju pemanfaatan sumber daya alam melalui hilirisasi guna menghasilkan nilai tambah yang lebih besar serta menjaga ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.
- Di sektor manufaktur, Indonesia telah membangun kekuatan pada industri berbasis sumber daya alam serta makanan dan minuman olahan. Namun, potensi sektor manufaktur berteknologi tinggi seperti elektronik, komponen otomotif, dan farmasi masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, sektor-sektor ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing ekspor dan memperluas keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai global.

- Sektor jasa juga menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan, terutama di bidang logisti dan telekomunikasi. Kontribusinya terhadap ekspor dan inovasi masih bisa terus dikembangkan. Untuk memaksimalkan potensinya, Indonesia dapat menyederhanakan regulasi, memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan investasi pada penelitian dan pengembangan, serta memperluas kerja sama internasional (OECD, 2024).
- Di sisi lain, sektor energi terbarukan menawarkan peluang besar bagi transformasi ekonomi jangka panjang. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa khususnya geotermal, surya, dan bioenergi yang dapat terus dioptimalkan (IESR, 2024). Dengan memperkuat kepastian kebijakan dan iklim investasi yang kondusif, Indonesia dapat mendorong transisi energi bersih di kawasan Asia Tenggara sekaligus menarik investasi hijau yang berkualitas tinggi.

**Gambar 1.**  
**Arus Masuk Penanaman Modal Asing Langsung (Foreign Direct Investment) di Asia Tenggara**



Sumber: World Development Indicators DataBank, 2025

Dalam konteks ini, akses ke OECD merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Penyelarasan dengan standar dan praktik terbaik OECD akan membantu meningkatkan kualitas regulasi, menarik investasi yang lebih produktif, serta memperkuat tata kelola di berbagai sektor kunci. Selain itu, keanggotaan OECD membuka akses pada keahlian teknis, platform pembelajaran antarnegara, serta kerja sama internasional yang mendukung agenda reformasi nasional.

Pengalaman negara-negara seperti Meksiko, Kosta Rika, dan Kolombia menunjukkan bahwa keanggotaan OECD dapat mendorong perbaikan kebijakan domestik dan memperkuat kinerja ekonomi. Indonesia berpotensi meraih manfaat serupa, dengan syarat komitmen kuat terhadap reformasi dan pemanfaatan optimal atas keanggotaan OECD sebagai katalis pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

## Akses OECD Dapat Mendorong Kinerja Makroekonomi dan Sektoral

Studi ini menggunakan pemodelan CGE untuk mengestimasi dampak akses Indonesia ke OECD terhadap indikator-indikator makroekonomi. Hasil estimasi tersebut kemudian dibandingkan dengan skenario di mana Indonesia tidak menjadi anggota OECD. Dalam merumuskan skenario tersebut, kami mengasumsikan bahwa akses Indonesia ke OECD akan terjadi pada 2027, dan dampak ekonominya mulai muncul pada 2028. Kami mengelompokkan dampak-dampak tersebut ke dalam tiga kategori: jangka pendek (2028–2030), jangka menengah (2031–2035), dan jangka panjang (2036–2045).

Pada 2028, Indonesia diperkirakan akan menerima arus masuk investasi sebesar US\$ 87,7 miliar, atau setara dengan 0,1% dari PDB di tahun tersebut. Sebagian besar investasi ini (25%) diproyeksikan berasal dari negara-negara anggota OECD, dengan nilai mencapai US\$ 22,6 miliar. Tingkat pertumbuhan investasi per tahun diperkirakan lebih tinggi 1,2 poin persentase dibandingkan *baseline* dalam jangka pendek (2028–2030), dan naik menjadi 1,8 poin persentase di atas *baseline* dalam jangka menengah (2031–2035). Peningkatan investasi ini merupakan dampak dari reformasi regulasi yang akan dilakukan Indonesia. Dalam jangka panjang (2036–2045), pertumbuhan investasi akan mengalami normalisasi setelah lonjakan investasi pada awal aksesi.

Peningkatan investasi ini akan menjadi pendorong utama pertumbuhan PDB. Laju pertumbuhan PDB tahunan diproyeksikan lebih tinggi 0,8 poin persentase dibandingkan *baseline* dalam jangka pendek dan 0,9 poin persentase dalam jangka menengah. Namun, dalam jangka panjang, laju pertumbuhan PDB tahunan akan mengalami normalisasi setelah lonjakan PDB di awal aksesi.

**Gambar 2.**  
**Proyeksi Skenario *Baseline* vs. Skenario Aksesi OECD terhadap Indikator-Indikator Makroekonomi, 2024–2045**



Sumber: Proyeksi penulis

Jika dibandingkan dengan skenario *baseline*, kontribusi neraca perdagangan terhadap PDB diperkirakan menurun dalam jangka pendek hingga menengah. Baik dalam jangka pendek maupun menengah, kontribusi perdagangan terhadap PDB diperkirakan lebih rendah 0,1 poin persentase dibandingkan *baseline*. Penurunan ini dipicu oleh lonjakan investasi yang mendorong peningkatan permintaan impor hingga melampaui kapasitas produksi domestik. Namun, dalam jangka panjang (2036–2045), neraca perdagangan diperkirakan akan membaik, di mana kontribusi neraca perdagangan terhadap PDB lebih tinggi 0,1 poin persentase dibandingkan skenario *baseline*.

Upah riil juga diproyeksikan naik dalam skenario akses OECD, seiring dengan bertambahnya lapangan kerja dan meningkatnya permintaan tenaga kerja. Dari jangka pendek (2028–2030) hingga jangka panjang (2036–2045), tingkat upah secara konsisten akan lebih tinggi dibandingkan *baseline*, mengikuti tren pertumbuhan permintaan tenaga kerja yang dipicu oleh lonjakan investasi. Sebaliknya, imbal hasil atas modal (*return on capital*) akan menurun secara bertahap dalam periode yang sama akibat meningkatnya pasokan modal, yang memicu persaingan lebih besar di pasar modal. Kondisi ini, ditambah dengan kebijakan dan situasi pasar yang stabil, akan mendorong penurunan suku bunga yang ditetapkan lembaga keuangan.

## Reformasi Kebijakan yang Diperlukan untuk Mencapai Pertumbuhan Tinggi Pascaaksesi

### Reformasi Regulasi untuk Memastikan Kelancaran Akses

Berdasarkan penilaian atas kesenjangan antara regulasi Indonesia dan instrumen OECD, Indonesia perlu melakukan reformasi regulasi, seperti ketika membentuk Satuan Tugas Deregulasi untuk merespon tarif yang diberlakukan Amerika Serikat, di beberapa aspek guna memperlancar proses akses keanggotaan OECD. Penilaian kesenjangan horizontal ini mencakup tinjauan atas sejumlah regulasi domestik dan pedoman OECD yang relevan di sektor-sektor strategis, seperti perdagangan, investasi, tata kelola korporasi, persaingan pasar, dan lingkungan. Meski sebagian besar regulasi Indonesia di bidang-bidang tersebut telah menunjukkan kesesuaian dengan instrumen OECD, dibutuhkan perubahan-perubahan penting pada peraturan perundang-undangan yang dapat membantu proses akses:

- Sangat penting bagi Indonesia untuk merevisi UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999). Meski telah mengakomodasi beberapa ketentuan dalam instrumen hukum OECD, UU ini belum mencakup perlindungan konsumen anak dan perlindungan konsumen dalam perniagaan elektronik (*e-commerce*).
- Indonesia sebaiknya meninjau kembali regulasi terkait pelayaran. Regulasi ini berpotensi menjadi hambatan terhadap persaingan usaha yang bebas dan sehat, khususnya dalam hal kepemilikan asing di sektor-sektor usaha maritim tertentu.
- Indonesia direkomendasikan untuk mengadopsi mekanisme uji tuntas (*due diligence*) yang holistik melalui regulasi khusus yang berlaku lintas sektor. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha di sektor pertanian menerapkan praktik uji tuntas yang menyeluruh dari hulu ke hilir.
- Indonesia sebaiknya memperbarui UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Revisi ini perlu diarahkan untuk mendorong pasar yang lebih terbuka dan berbasis merit, sekaligus mengurangi pendekatan pasar yang terlalu berpusat pada badan usaha milik negara (BUMN) secara bertahap.
- Instrumen hukum OECD memandang sektor pertanian sebagai industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Mengingat bahwa sektor pertanian di Indonesia diatur dengan sangat ketat, Indonesia perlu menyesuaikan pendekatannya dengan perspektif OECD serta mendorong kolaborasi lintas sektor.
- Karena OECD tegas mendorong peralihan dari penggunaan batu bara, Indonesia direkomendasikan untuk segera menyusun kerangka regulasi relevan yang mengatur integrasi kebijakan energi terbarukan dan iklim.

## Reformasi Regulasi untuk Membuka Akses Pasar

- Pengurangan hambatan nontarif (NTM) oleh Indonesia akan berguna untuk menekan biaya kepatuhan yang berkaitan dengan perdagangan. Secara khusus, mengurangi NTM di sektor-sektor yang berhubungan dengan ekspor dan integrasi ke rantai nilai global akan turut menciptakan iklim usaha yang lebih stabil.
- Indonesia dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan keterbukaan investasi di sektor jasa. Secara khusus, peningkatan keterbukaan sektor layanan maritim secara bertahap dapat mendukung perbaikan sistem logistik dan menurunkan biaya logistik dalam jangka panjang.
- Peninjauan secara komprehensif kebijakan penanaman modal asing yang masih berlaku dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Upaya ini dapat dilakukan dengan, antara lain, mengevaluasi kembali ketentuan modal minimum bagi perseroan terbatas penanaman modal asing (PT PMA, atau perusahaan dengan kepemilikan asing) serta mendayagunakan tenaga kerja asing yang menempati posisi-posisi kunci dalam entitas bisnis di Indonesia untuk kemudian dilakukan transfer knowledge yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.
- Mendorong semakin terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan yang mendukung efisiensi dan kemudahan berusaha. Salah satu kebijakan kunci yang perlu direformasi adalah kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Dengan reformasi tersebut, akses terhadap barang setengah jadi (*intermediate goods*) dapat menjadi lebih murah sehingga mendukung peningkatan daya saing industri-industri yang berorientasi pada ekspor.

Untuk pertanyaan lebih lanjut atau untuk mengakses laporan ini, silakan hubungi CIPS melalui [contact@cips-indonesia.org](mailto:contact@cips-indonesia.org).

## Referensi

---

Hill, H., & Pane, D. (2018). 14. Indonesia and the global economy: missed opportunities?. ISEAS Publishing. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1355/9789814818230-019/pdf?licenseType=restricted>

IESR. (2024). Indonesia Energy Transition Outlook. <https://iesr.or.id/en/pustaka/indonesia-energy-transition-outlook-ieto-2024/>

Laksono, R., Oktiyanto, F., & Vadila, Y. (2024). Labor Market Impact of Export in a Commodity-Dependent Nation: The Case of Indonesia. *ADB Working Paper Series*, (1481), 1-39. <https://www.adb.org/publications/labour-market-impact-of-export-in-a-commodity-dependent-nation-the-case-of-indonesia>

OECD. (2024). Services Trade in Indonesia: Exploring Patterns, Policies, and Reform Scenarios. [https://www.oecd.org/en/publications/services-trade-in-indonesia\\_3bcc85bc-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/services-trade-in-indonesia_3bcc85bc-en.html)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/299728/uu-no-59-tahun-2024>

United States Department of State. (2022). 2022 Investment Climate Statements: Indonesia. <https://www.state.gov/reports/2022-investment-climate-statements/indonesia/>

World Bank. (2023). *Indonesia economic prospects: The invisible toll of COVID-19 on learning* (June 2023). International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Retrieved January 22, 2025, from <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/e276a12e-4a4c-4429-812f-fd14f77337c5/content>

## TENTANG PENULIS

**Wahyuni Bahar** mendirikan Bahar pada tahun 1992. Ia merupakan pengacara senior ternama dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam menangani transaksi kompleks dan mendorong pertumbuhan di berbagai sektor industri. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung, dan gelar Master of Laws dari McGill University, Montreal, Kanada. Keahliannya melampaui bidang hukum, mencakup pemahaman mendalam terhadap pasar lokal maupun internasional. Pemahaman ini menjadi fondasi bagi pendirian berbagai entitas di bawah Bahar Group, termasuk Bahar Law & Advisory, Bahar Institute, dan Bahar Academy, yang berfokus pada layanan hukum dan konsultasi, riset, pendidikan, serta pelatihan.

**Biyen Shandy** adalah Peneliti dan Analis Kebijakan di CIPS. Ia meraih Master Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan dari Universitas Indonesia, serta gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya/Indonesia. Sebelum bergabung dengan CIPS, Biyen berkontribusi dalam penelitian di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia dan ITS Surabaya.

**Deasy Pane** adalah seorang Peneliti Mitra di CIPS. Dia sudah bekerja selama lebih dari satu dekade di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Selama masa kariernya, beliau fokus pada perencanaan di bidang isu-isu ekonomi terutama kebijakan perdagangan. Penelitiannya berfokus pada area ekonomi pembangunan, perdagangan internasional, industri, dan kebijakan publik. Dr. Deasy Pane menerima gelar PhD dibidang ekonomi dari Australian National University dan mempunyai gelar insinyur dari Institut Teknologi Bandung.

**Fresa Yuriza** adalah Associate Partner di Bahar Law Firm dengan pengalaman lebih dari 14 tahun di bidang hukum, termasuk saat bertugas di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelum bergabung dengan Bahar. Di Bahar, Fresa terlibat aktif dalam berbagai proyek dan transaksi bisnis, memberikan layanan konsultasi hukum di sejumlah bidang, seperti Perdagangan, Industri dan Investasi; Bisnis Digital dan Teknologi; Infrastruktur; Pasar Modal; serta Restrukturisasi Bisnis. Ia mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sriwijaya, Palembang, dan meraih gelar Master of Laws dari Erasmus University, Rotterdam, Belanda.

**Hasran** adalah seorang Peneliti dan Analis Kebijakan Senior di CIPS. Sebelum bergabung dengan CIPS, Ia pernah bekerja sebagai Asisten Peneliti Integrasi Ekonomi Domestik di Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan Konsultan Riset untuk Atase Perdagangan KBRI Canberra/Australia.

**Krisna Gupta** adalah seorang Peneliti Mitra di CIPS. Ia merupakan ekonom yang menggunakan berbagai jenis regresi data panel dan alat kuantitatif lainnya untuk mengevaluasi kebijakan perdagangan dan investasi internasional serta pertumbuhan manufaktur Indonesia. Beliau meraih dua gelar PhD dari Crawford School of Public Policy, Australian National University dan dua Master di bidang ekonomi dari Universitas Indonesia dan VU University Amsterdam.

**Leony Fadila** adalah Junior Associate di Bahar Law Firm yang aktif memberikan layanan konsultasi hukum untuk berbagai transaksi bisnis di sejumlah bidang praktik, seperti Infrastruktur; Restrukturisasi; serta Perdagangan, Industri, dan Investasi. Pengalamannya mencakup pemberian nasihat hukum dalam proyek penerbangan dan perkeretaapian, tata kelola perusahaan dan kepatuhan internal, serta audit hukum. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.

**Maria Dominika** adalah Peneliti dan Analis Kebijakan di CIPS. Ia meraih gelar sarjana Ilmu Politik dari Universitas Padjadjaran Bandung, yang diselesaikannya dengan beasiswa dari Bank Indonesia. Monik pertama kali bergabung dengan CIPS melalui Emerging Policy Leaders Program tahun 2023, yang kemudian direkrut sebagai asisten peneliti.

**Naura Nabila** merupakan Associate di Bahar Law Firm dan lulusan Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Sejak bergabung pada 2021, ia aktif terlibat dalam berbagai proyek di sektor infrastruktur dan energi terbarukan. Pengalaman Naura dalam mendampingi perusahaan di bidang telekomunikasi, penerbangan, dan infrastruktur air mencerminkan fleksibilitas serta keahliannya di berbagai sektor strategis.

Kerja kami bergantung pada dukungan Anda.

Kunjungi [www.cips-indonesia.org/donate](http://www.cips-indonesia.org/donate) untuk mendukung CIPS.



# Lihat ringkasan kebijakan lain yang diterbitkan Center for Indonesian Policy Studies



Dampak Kebijakan Perdagangan Terhadap Daya Saing UMKM di Indonesia: Kasus Pembatasan Impor Melalui E-Commerce



Strategi Indonesia untuk Bergabung dalam Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN



Mendirikan Perguruan Tinggi Luar Negeri di Indonesia



Pajak Digital di Indonesia



Perlindungan Keamanan Siber di Indonesia



Siapa yang Bertanggung Jawab atas Konten Buatan Pengguna pada Platform Digital di Indonesia?



Kerahasiaan Data dalam Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia



Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya



Menarik Penanaman Modal Asing (PMA) Pasca Covid-19 Melalui Penyederhanaan Kerangka Kerja Peraturan Indonesia

Silahkan kunjungi situs kami untuk membaca publikasi lainnya:

[www.cips-indonesia.org/publications](http://www.cips-indonesia.org/publications)

